

KESIAPAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL MELALUI *HIGH TECHNOLOGY*

Wilma Silalahi¹ & Eugenia Felicia Natiur Siregar²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Gajahmada Yogyakarta
Email: euginesrg@gmail.com

ABSTRACT

The global recession occurred due to the world economy which is currently experiencing inflationary turmoil which could result in soaring energy and food commodity prices. As part of a world country, Indonesia must be prepared to face the threat of a 2023 recession this year. Thus, the interesting problem in this research is how prepared is Indonesia in facing a global recession? This issue is interesting, considering that in the world's economic conditions due to inflation, the Russia-Ukraine war, including the Covid-19 pandemic, experienced shocks and downturns. In this paper, a study will be conducted to provide considerations in facing the global recession, Indonesia must be prepared with various policies. This paper uses a normative approach with a post-positivism paradigm. Recession prevention is one way to minimize and even avoid the effects of a recession. In the face of recession risks, the World Bank asked central banks to coordinate their actions and communicate policy decisions clearly to reduce the level of tightening needed. In addition, one effective way to deal with the threat of a global recession is through high technology or digitalization. Utilization of high technology can also be carried out by moving the MSME sector through the use of digitalization, increasing food security, strengthening the global health architecture, and a sustainable energy transition. This method can be implemented to increase income in all sectors, namely by utilizing economic growth, investment, capital and infrastructure, employment, and skills. Utilization of high technology can increase the rate of economic growth and foreign cooperation with various countries, so that state revenues increase.

Keywords: *Global, high technology, inflation, Russia-Ukraine war, recession*

ABSTRAK

Resesi global terjadi akibat perekonomian dunia yang tengah mengalami gejolak inflasi yang dapat mengakibatkan melonjaknya harga komoditas energi dan pangan. Sebagai bagian dari negara dunia, Indonesia harus siap menghadapi ancaman resesi 2023 tahun ini. Dengan demikian, yang menjadi permasalahan menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi resesi global? Isu ini menjadi menarik, mengingat di kondisi perekonomian dunia akibat inflasi, perang Rusia-Ukraina, termasuk pandemi covid-19 mengalami guncangan dan keterpurukan. Dalam tulisan ini akan dilakukan kajian untuk memberikan pertimbangan dalam menghadapi resesi global, Indonesia harus siap dengan berbagai kebijakan. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma *post-positivisme*. Pencegahan resesi merupakan salah satu cara meminimalisir bahkan menghindari dampak resesi. Dalam menghadapi resiko resesi, Bank Dunia meminta bank sentral untuk mengkoordinasikan tindakan mereka dan mengkomunikasikan keputusan kebijakan dengan jelas untuk mengurangi tingkat pengetatan yang diperlukan. Selain itu, salah satu cara yang efektif dalam menghadapi ancaman resesi global, adalah melalui *high technology* atau digitalisasi. Pemanfaatan *high technology* juga dapat dilakukan dengan menggerakkan bidang UMKM melalui penggunaan digitalisasi, peningkatan ketahanan pangan, penguatan arsitektur kesehatan global, dan transisi energi berkelanjutan. Cara ini dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan di semua sektor, yaitu dengan cara pemanfaatan pada pertumbuhan ekonomi, investasi, modal dan infrastruktur, lapangan kerja, dan keterampilan. Pemanfaatan *high technology* dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kerjasama luar negeri dengan berbagai negara, hingga pendapatan negara meningkat.

Kata kunci: *Global, high technology, inflasi, perang Rusia-Ukraina, resesi*

1. PENDAHULUAN

Perekonomian dunia tengah mengalami gejolak-gejolak inflasi sebagaimana diungkapkan oleh Hiroshi Watanebe selaku Presiden Institute for International Monetary Affairs. Menurut

Watanebe, negara yang paling merasakan gejala inflasi adalah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Kondisi itu disebabkan terjadinya perang Rusia dan Ukraina, yang membatasi aktivitas ekonominya sehingga mengakibatkan melonjaknya harga komoditas energi dan pangan. Rusia, sebagai produsen minyak dan gas, dijatuhi sanksi larangan ekspor. Sementara Ukraina, produsen gandum terbesar keempat di dunia, juga mengalami kesulitan pengiriman komoditas. Kabana, karena pasokan dari kedua negara terhambat, menyebabkan harga energi dan komoditas pangan meroket. Kondisi ini menyebabkan kebijakan moneter yang dilakukan secara ketat oleh banyak negara dengan menaikkan tingkat suku bunga mengakibatkan tertahannya laju pertumbuhan ekonomi bahkan berkontraksi (Effendi, etc., 2023: 637-645). Hal ini membuka peluang terjadinya resesi. Lebih lanjut Watanabe menguraikan, kenaikan suku bunga The Fed memicu penguatan *yield* obligasi AS dan imbasnya mata uang dollar semakin menguat (Widianto, 2022).

International Monetary Fund (IMF) memberikan peringatan bahwa akan datang tantangan yang berat untuk ekonomi global, diperkirakan inflasi lebih tinggi daripada beberapa dekade sebelumnya yang mengakibatkan banyak negara melakukan pengetatan keuangan. Laporan mengenai World Economic Outlook tahun 2022 dan tahun 2023 yang dikeluarkan oleh IMF menyatakan bahwa ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,3% pada tahun 2022 dan turun menjadi 5% di tahun 2023 (Saputri & Nashurril, 2022). Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi dunia menurut IMF diproyeksikan pada tahun 2022 adalah 3,2%, pada tahun 2021 sebesar 5,7%. Sementara untuk tahun 2023 IMF memproyeksikan sebesar 2,9%. Sehingga, melalui proyeksi IMF ini akan banyak negara kesusahan dalam mendapat dana belanja negara dan kesusahan dalam mengelola pembiayaan (Hutagaol, etc., 2022: 378-385).

IMF dan Bank Dunia memprediksikan kondisi ekonomi global pada tanggal 10 Januari 2023 dengan mengeluarkan *outlook* dengan arah (*stance*) yang cenderung bertolak belakang (Republika, 2023).

Tabel 1

Kondisi ekonomi global IMF dan Bank Dunia

| | 2019 | 2020 | 2021 | IMF | | World Bank | | OECD | |
|-----------|------|------|------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
| | | | | 2022F | 2023F | 2022F | 2023F | 2022F | 2023F |
| World | 2.5 | -3.4 | 6.2 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 3.1 | 2.2 |
| US | 2.3 | -3.4 | 5.9 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 0.5 |
| Euro Zone | 1.6 | -6.1 | 5.3 | 3.5 | 0.7 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 0.5 |
| Indonesia | 5.0 | -2.1 | 3.7 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 4.7 |
| Japan | -0.4 | -4.6 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.8 |
| China | 6.0 | 2.2 | 8.4 | 3.0 | 5.2 | 2.7 | 4.3 | 3.3 | 4.6 |
| India | 3.7 | -6.6 | 8.7 | 6.8 | 6.1 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 5.7 |
| Rusia | 2.2 | -2.7 | 4.7 | -2.2 | 0.3 | -3.5 | -3.5 | -3.9 | -5.6 |
| Brazil | 1.2 | -3.9 | 5.0 | 3.1 | 1.2 | 3.0 | 0.8 | 2.8 | 1.2 |
| ASEAN-5 | 4.9 | -3.4 | 3.8 | 5.2 | 4.3 | - | - | - | - |

Pada tanggal 10 Januari 2023, Bank Dunia mengeluarkan *outlook*-nya untuk proyeksi global. Bank Dunia memproyeksikan ekonomi global pada tahun 2023 hanya tumbuh 1,7%, turun 1,3% dibanding *outlook* yang dibuatnya pada Juni 2022. Pada tanggal 30 Januari 2023, IMF menerbitkan *outlook*-nya terhadap proyeksi ekonomi global 2023 yang justru lebih optimistik dibanding *outlook* sebelumnya. Pada rilis *outlook* Januari 2023, IMF memproyeksikan ekonomi

global 2023 tumbuh 2,9%, naik 0,2% dibanding proyeksi yang dibuat pada Oktober 2022 (Republika, 2023).

Krisis keuangan (*financial*), pangan, dan energi global yang sedang terjadi serta tekanan infalasi menjadikan dunia dibayangi ancaman resesi. Terjadinya gejolak pasar global seperti pasar modal, pasar valuta asing (*valas*), serta pasar uang membuat perekonomian dunia menjadi terombang-ambing yang juga merupakan ancaman resesi. Terombang-ambingnya ekonomi global merupakan awal dari krisis ekonomi global (Hutagaol, etc., 2022: 378-385). Pengalaman Indonesia dalam krisis tahun 1997-1998 yang lalu menunjukkan bagaimana kegagalan pasar yang berdampak buruk bagi perekonomian yang menuntut partisipasi pemerintah untuk mengatasi dampak krisis dengan mengalirkan dana guna menyelamatkan perekonomian nasional. Dana yang dialirkan untuk membantu pelaku-pelaku ekonomi (umumnya bank yang kolaps) berasal dari rakyat yang diserap melalui pajak dan sumber pendapatan lainnya. Hal ini menunjukkan bagaimana kegagalan pasar dalam kapitalisme sebagai akibat perilaku spekulatif dari pelaku pasar harus dibayar oleh rakyat yang justru tidak pernah menikmati hasil dari sistem ekonomi pasar tersebut (Hamid, 2009).

Sebagai bagian dari negara dunia, Indonesia harus siap menghadapi ancaman resesi 2023 tahun ini. IMF berspekulasi bahwa tingkat pertumbuhan Indonesia tahun 2023 akan dihantui oleh deselerasi global. Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan mengalami perlambatan, yaitu sebesar 3,9%, sementara untuk inflasi sebesar 9,5% (Hutagaol et al., 2022). Dengan demikian harus dicari upaya dalam menghadapi ancaman resesi. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan mendorong peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 37,8%. Dari data inilah, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Tiap tahunnya sektor ini memberi persentase yang besar dalam pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia. Dengan jumlah UMKM yang selalu bertambah di setiap tahunnya, maka secara tidak langsung jumlah pengangguran juga akan berkurang. Selanjutnya, nilai tambahan UMKM adalah ketergantungannya terhadap nilai dolar yang kecil. Sehingga, naik turunnya nilai dolar di dunia tidak akan berpengaruh besar terhadap pergerakan UMKM di Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan utama UMKM menjadi solusi dalam berbagai keadaan ekonomi (ITS News, 2022).

Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah melakukan pencegahan ancaman resesi. Sehingga, dipandang perlu untuk mendesain permasalahan yang menarik pada tulisan ini, yaitu bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi resesi global? Isu ini menjadi menarik, mengingat di tengah kondisi perekonomian dunia akibat inflasi, perang Rusia-Ukraina, termasuk pandemi covid-19 mengalami guncangan dan keterpurukan. Oleh karena itu, perlu kesiapan negara Indonesia dalam menghadapi resesi global yang akan terjadi.

Tulisan sederhana ini tidak bermaksud untuk menjustifikasi bahwa di tengah resesi global, Indonesia belum siap menghadapinya, namun hendak memberikan pilihan sudut pandang lain,

meskipun tidak dapat dihindari pikiran-pikiran yang beririsan satu sama lain. Dalam tulisan ini akan dilakukan kajian untuk memberikan pertimbangan bahwa dalam menghadapi resesi global, negara Indonesia harus siap dengan berbagai kebijakan. Pemerintah Indonesia harus sudah siap dan bagaimana tanggung jawab negara dalam menghadapi resesi global. Selain itu, perlu diketahui pentingnya perlindungan terhadap masyarakat Indonesia dalam menghadapi resesi global. Dengan demikian, dipandang perlu pembahasan lebih lanjut terkait kesiapan Indonesia dalam menghadapi resesi global dengan menggunakan *high technology*.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif (Soekanto dan Mamudji, 1985) atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian doktrinal (Sunggono, 1997: 42), yaitu kajian yang menggunakan *legis positivis*, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu dalam konsepsi ini dipandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebut perspektif ini adalah melihat hukum sebagai suatu peraturan-peraturan yang abstrak, perhatiannya akan tertuju pada lembaga yang benar-benar otonom, yaitu sesuatu yang dapat dibicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan yang mengaturnya. Selain itu, pemusatannya akan membawa pada metode yang normatif dan sesuai dengan pembahasannya yang analisis, sehingga metode ini disebut juga sebagai metode normatif analisis (Soekanto dan Mamudji, 1985: 15). Oleh karena itu, kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma *post-positivisme*, guna terciptanya kesiapan Indonesia dalam menghadapi resesi global melalui *high technology*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengenai krisis, asal muasalnya krisis merupakan kesalahan (atau lebih tepatnya ketamakan) perusahaan finansial dalam mengalokasikan dananya pada kredit perumahan sub-prima (*subprima mortgage*). Kesalahan ini dengan sendirinya menunjukkan kelemahan mendasar dari sistem ekonomi kapitalis yang semata-mata mendasarkan proyeksi bisnis pada spekulasi atas kemungkinan pendapatan di masa mendatang dan tanpa melihat realitas dunia ekonomi yang tengah berlangsung. Bencana keuangan yang melanda setelah kredit macet terjadi dan melumpuhkan sejumlah raksasa finansial yang *memback-up* nya, mulai dari bangkrutnya bank raksasa Lehman Brothers dan perusahaan finansial raksasa Bear Stearns. Beberapa saat sebelumnya, pemerintah AS terpaksa telah mengambil alih perusahaan *mortgage* terbesar di Amerika, Freddie Mac dan Fannie Mae. Sementara Merrill Lynch mengalami kondisi tak jauh berbeda hingga harus diakuisisi oleh Bank of America. Terakhir perusahaan asuransi terbesar American International Group (AIG) menunjukkan gejala kritis yang sama. Untuk mengatasi badai krisis yang hebat dan menyelamatkan bank-bank raksasa yang terpuruk, pemerintah Amerika Serikat terpaksa melakukan *bailout* sebesar 700 miliar dolar sampai 1 triliun US dolar. Intervensi negara terhadap sektor keuangan di AS tersebut, selain merupakan kebijakan yang bertentangan dengan kapitalisme, juga dinilai belum mampu menyelamatkan krisis yang terus akan terjadi. Kebijakan *bailout* tidak sama dengan yang dilakukan pemerintah AS, begitu pula dengan bank sentral Eropa dan Asia turun tangan menyuntikkan dana untuk mendorong likuiditas perekonomian, sehingga diharapkan dapat mencegah efek domino dari ambruknya bank-bank investasi kelas dunia tersebut (Hamid, 2009).

Resesi yang merupakan kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya (seolah-olah terhenti); menurunnya (mundurnya, berkurangnya) kegiatan dagang (industri): telah menimbulkan pengangguran di negara-negara industri; ekonomi, kelesuan ekonomi (KBBI). Disebut juga bahwa resesi merupakan suatu keadaan dimana perekonomian obsolet, negara menjadi negatif dan mulai muncul pengangguran. Resesi menjadi guncangan ekonomi yang besar, yang menimbulkan banyak dampak bagi perekonomian di dunia, yaitu ditandai dengan (Hutagaol et al., 2022): *pertama*, naiknya biaya hidup. Kondisi ini muncul dari momentum pemulihan ekonomi (pasca pandemi) yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan permintaan yang sangat signifikan, namun tidak dibarengi dengan pasokan yang memadai akibat terganggunya rantai pasokan global.

Kedua, sempitnya lapangan pekerjaan. Resesi yang besar akan menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah pekerjaan. Kontraksi di sektor produsen akan minimnya investasi membuat banyak kantor memilih untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa resesi. *Ketiga*, degradasi pendapatan negara. Resesi global yang tinggi akan mengganggu aktivitas ekspor yang akhirnya akan membuat pendapatan negara melemah terutama Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). *Keempat*, turunnya nilai tukar rupiah. Dalam resesi, investor akan cenderung menarik modalnya dari obligasi maupun saham. Hal ini yang menjadi cikal bakal turunnya nilai tukar rupiah. Inflasi terjadi akibat terlalu banyaknya jumlah uang yang beredar. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak inflasi adalah dengan mengambil kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral, yakni dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara meningkatkan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga akan menyesuaikan dengan besaran inflasi. Peningkatan inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga ikut meningkat.

Dunia yang sedang dibayang-bayangi oleh fenomena-fenomena besar, berpotensi dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi global. Hal ini dapat menjadi pemicu resesi global, sebagai berikut (Hutagaol et al., 2022):

- a. Kenaikan suku bunga (Inflasi). Bank of England menaikkan suku bunga acuan sebesar 200 basis poin. Pada saat yang sama, Amerika Serikat (*The Fed*) menaikkan suku bunga acuan sebesar 300 basis poin. Bank sentral AS, *The Fed*, secara agresif mengerek suku bunganya sebagai upaya untuk meredam lonjakan inflasi, yang naik 9,1 persen (*year on year/yo-y*). Sementara, Bank Indonesia (BI) juga menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 4,25% (Kompas.com, 2022). Tekanan terhadap rupiah meningkat karena investor portofolio global menyesuaikan diri dengan likuiditas yang lebih ketat dan menyeimbangkan kembali eksposur mereka di negara-negara berkembang, yang dianggap berisiko terhadap arus keluar modal yang cepat, yaitu sebesar Rp. 5,28 triliun, sedangkan obligasi pemerintah non-residen telah terjual senilai Rp. 124,42 triliun (Nasir, 2022). Kenaikan suku bunga ini mengakibatkan sulitnya perputaran uang terjadi. Hal ini juga menyebabkan biaya untuk pinjaman meningkat, pengurangan insentif investasi, pelemahan manufaktur, serta pada akhirnya menyebabkan pemulihan ekonomi menjadi lambat (Nasir, 2022). Kenaikan suku bunga acuan *separation simultaneous* oleh bank sentral di seluruh dunia akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan dapat menyebabkan resesi global. Menaikkan suku bunga membuat pinjaman lebih mahal dan dinilai dapat menurunkan laju kenaikan harga, yang akibatnya membuat pinjaman lebih mahal dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi (Republika, 2022). Namun, tekanan inflasi global ini beriringan dengan tingginya harga

- beberapa komoditas pangan dan energi (minyak mentah, gas alam, dan batu bara) akibat gangguan rantai pasokan dengan terjadinya perang Rusia-Ukraina.
- b. Isu ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina. Ekonomi global belum pulih karena pandemi covid-19, ditambah pecah perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022, yang telah merugikan dunia sebesar \$2,8 triliun (Bisnis Indonesia, 2008). Invasi militer Rusia menyebabkan tensi global meningkat secara signifikan karena terdapat pro dan kontra antar negara di dunia. Peningkatan tensi global ini menyebabkan perekonomian dunia terguncang. Terguncangnya perekonomian dunia ditandai oleh naiknya harga energi seperti minyak mentah dan harga pangan secara global. Perang Rusia-Ukraina mengganggu rantai pasokan global, memicu krisis terutama di sektor pangan dan energi yang dapat mempercepat inflasi. Sehingga diperkirakan resesi global pada tahun 2023.
 - c. *Scarring Effect* akibat pandemi covid-19. Pandemi covid-19 cukup memberikan dampak negatif pada perekonomian dunia, contohnya, negara Indonesia tahun 2020 pasar pekerjaan formal menurun di bawah 40%. Penurunan pasar pekerja ini mengakibatkan meningkatnya angka PHK yang merupakan wujud nyata dari *scarring effect*. Pandemi covid-19 memang sudah mulai mereda dan banyak negara yang sudah membebaskan warganya untuk beraktivitas seperti biasa. Pada periode antara wabah covid-19 di awal tahun 2020 hingga tahun 2022, aktivitas ekonomi global turun tajam. Negara-negara fokus menangani pandemi covid-19 dengan memberlakukan pembatasan aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi global mengalami kontraksi. Negara-negara mengalami resesi termasuk Indonesia akibat covid-19.

Dengan adanya fenomena-fenomena di atas, dapat mengakibatkan negara-negara akan mengalami inflasi dan akan berakhir dengan resesi global.

Menurut Menko Airlangga, Indonesia telah melakukan pengendalian inflasi dengan cukup baik, yang saat ini berada pada 5,9%. Masih menurut Airlangga, upaya pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah, antara lain melalui langkah-langkah sebagai berikut (Menko Airlangga, 2022): (a) mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP); (b) mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial; (c) di tengah kenaikan harga energi di tingkat global, Pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya agar harga di dalam negeri tetap stabil dan terjangkau, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga; (d) mengeluarkan berbagai bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 12,4 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp. 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan bantuan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun agar masih berada di sekitar 5,2% dan tahun depan tetap bertahan di atas 5%; dan (e) terkait dengan ancaman krisis pangan, Pemerintah juga telah memprioritaskan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga-harga pangan.

Guncangan ekonomi yang mendadak dapat memicu terjadinya resesi dengan kurangnya persiapan dari negara-negara. Beban bunga utang meningkat bagi masyarakat maupun perusahaan akibat dari peningkatan suku bunga yang cukup tinggi. Selain itu, terdepresiasi mata uang negara berkembang terhadap dolar membuat utang luar negeri meningkat dari yang sudah diprediksi. Sehingga, pencegahan resesi merupakan salah satu cara untuk meminimalisir

bahkan menghindari dampak resesi. Dampak melonjaknya harga komoditas, meningkatnya tingkat PHK, krisis energi, krisis pangan dan air, volatilitas harga komoditas dan energi, peningkatan emisi gas rumah kaca, kesenjangan pendapatan, ketidakseimbangan fiskal kronis dan terorisme (World Economic Forum, 2012). Oleh karena itu diperlukan instrumen-instrumen untuk menghindarinya.

Di dalam menghadapi resiko resesi, Bank Dunia meminta bank sentral untuk mengkoordinasikan tindakan mereka dan mengkomunikasikan keputusan kebijakan dengan jelas untuk mengurangi tingkat pengetatan yang diperlukan. Inflasi yang merupakan gambaran dari tingkat kenaikan harga mencapai level tertinggi selama 40 tahun terakhir. Hal ini didorong oleh permintaan yang lebih tinggi karena pembatasan pandemi mereda. Selain itu, akibat perang di Ukraina mendorong kenaikan harga energi, bahan bakar, dan pangan. Selanjutnya, pembuat kebijakan bank sentral telah menaikkan suku bunga untuk mendinginkan permintaan dari rumah tangga dan bisnis. Kenaikan suku bunga yang besar beresiko meningkatkan resesi karena dapat mengakibatkan perlambatan ekonomi (Republika, 2022).

Salah satu cara yang efektif dalam menghadapi ancaman resesi global, adalah melalui *high technology* atau digitalisasi. Cara ini dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan di semua sektor, yaitu dengan cara pemanfaatan pada pertumbuhan ekonomi, investasi, modal dan infrastruktur, lapangan kerja, dan keterampilan. Pemanfaatan *high technology* dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kerjasama luar negeri dengan berbagai negara, sehingga pendapatan negara meningkat. Pemanfaatan *high technology* juga dapat dilakukan dengan menggerakkan bidang UMKM melalui penggunaan digitalisasi, peningkatan ketahanan pangan, penguatan arsitektur kesehatan global, dan transisi energi berkelanjutan. Peningkatan UMKM dan penggunaan *high technology* dalam menghadapi resesi global, juga harus disertai melalui kebijakan dan regulasi yang tepat guna terciptanya kepastian hukum dan terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia sejak dini sudah harus siap dalam menghadapi resesi global. Kenaikan inflasi dihadapi bangsa Indonesia dengan cara meningkatkan pendapatan di semua sektor, yaitu dengan cara pemanfaatan pada pertumbuhan ekonomi, investasi, modal dan infrastruktur, lapangan kerja, dan keterampilan. Masyarakat harus dipersiapkan ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai negara yang turut menciptakan dan melaksanakan ketertiban dunia, dalam menghadapi perang Rusia-Ukraina, bangsa Indonesia harus berada di pihak netral sebagaimana amanat konstitusi. Kerjasama luar negeri perlu semakin digerakkan sehingga mendongkrak perekonomian dunia. Selanjutnya, di tengah pandemi covid-19 yang sudah mulai mereda, semua sektor harus kembali dihidupkan dan digerakkan, bagaimana mengembalikan perekonomian anak bangsa, serta menggerakkan UMKM. Dalam kondisi di atas, salah satu cara yang dapat dilaksanakan, yaitu dengan pemanfaatan *high technology*. Pemanfaatan *high technology* dapat menjadi salah satu cara dalam menghadapi resesi global. Pemanfaatan *high technology* dimaksudkan dalam hal kerjasama dengan berbagai negara, di tengah pandemi covid-19 tetap dapat terselenggarakan kendati tidak dapat bertemu secara langsung. Begitu pula dalam bidang perdagangan maupun bidang-bidang lainnya tetap dapat terselenggara dengan menggunakan *high technology*.

REFERENSI

- Effendi, B., & Windiarko, M. A. (2023). Kesiapan Bank Syariah dalam Menghadapi Resesi 2023. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01): 637-645. file:///C:/Users/197411222006042002/Downloads/8015-26459-1-PB.pdf.
- Hamid, E. S. (Juli 2009). Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia. *La Riba, Jurnal Ekonomi Islam*, III(1): 1-11. <https://journal.uii.ac.id/JEI/article/download/2550/2338/2691>.
- Hutagaol, Yobel Rayfinando Tua, Ronaldo Putra Pratama Sinurat, dan Sulthan Muhammad Shalahuddin. (2022). Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Melalui *Green Economy*. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(1S): 378-385. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/download/1911/1028>.
- ITS News. (5 November 2022). Ancaman Resesi 2023, UMKM Bisa jadi Solusi Jitu. <https://www.its.ac.id/news/2022/11/05/ancaman-resesi-2023-umkm-bisa-jadi-solusi-jitu/>. Diunduh pada tanggal 20 Mei 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/resesi>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Siaran Pers Nomor H.M.4.6/586/SET.M.EKON.3/10/2022. *Tingkatkan Resiliensi Hadapi Ancaman Resesi Global, Menko Airlangga Ungkap Sejumlah Langkah Penting bagi Kesiapan Indonesia*. Jakarta, 18 Oktober 2022. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4630/tingkatkan-resiliensi-hadapi-ancaman-resesi-global-menko-airlangga-ungkap-sejumlah-langkah-penting-bagi-kesiapan-indonesia>.
- Kompas.com. (22 September 2022). BI Naikkan Suku Bunga Acuan 50 Basis Poin Jadi 4,25 Persen. <https://money.kompas.com/read/2022/09/22/144407226/bi-naikkan-suku-bunga-acuan-50-basis-poin-jadi-425-persen>. Diunduh pada tanggal 11 Mei 2023.
- Nasir, A. (22 September 2022). Sikap “Hawkish” The Fed dan Upaya BI Pertahankan Nilai Rupiah. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2022/09/22/102049026/sikap-hawkish-the-fed-dan-upaya-bi-pertahankan-nilai-rupiah>. Diunduh pada tanggal 11 Mei 2023.
- Republika. (17 September 2022). Bank Dunia: Kenaikan Suku Bunga Global Bakal Picu Resesi Ekonomi 2021. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/ricjl8383/bank-dunia-kenaikan-suku-bunga-global-bakal-picu-resesi-ekonomi-2023>. Diunduh pada tanggal 12 Mei 2023.
- , Republika. (6 Februari 2023). *Outlook IMF Vs Bank Dunia: Mitos Resesi Global?*. <https://www.republika.id/posts/37164/outlook-imf-vs-bank-dunia-mitos-resesi-global>. Diunduh pada tanggal 12 Mei 2023.
- Saputri, D.S. & Nashrullah, N. (2022). Akankah Indonesia Terpuruk Hadapi Resesi 2023? Ini Penjelasan KSP. *REPUBLIKA.Co.Id*.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widianto, Satrio. (2022). Gejolak Inflasi di AS dan Eropa Bayang-bayangi Ancaman Resesi Global. <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015784813/gejolak-inflasi-di-as-dan-eropa-bayang-bayangi-ancaman-resesi-global>.